

PERAN GURU PKN DALAM MEMBINA MORAL SISWA SMP DI ERA DISRUPSI

Zakiyatul Muskiyah

PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret

zakiyatulmuskiyah@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Guru PKn mempunyai peranan yang membawa peserta didik menjadi manusia yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap, dan pengetahuan kepada peserta didiknya. Di era disruptif ini di mana perkembangan teknologi semakin pesat yang memudahkan siswa untuk mengakses berbagai macam informasi secara luas dan mudah. Namun perkembangan teknologi ini terkadang membuat siswa kurang bijak dalam memilih informasi dan terkadang siswa dengan mudah mengakses konten-konten negatif serta meniru perilaku-perilaku negatif yang pada akhirnya membuat moral/etika siswa mengalami kemerosotan. Penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan peran guru PKn dalam membentuk moral siswa SMP di era disruptif. Hasil penulisan artikel ini menunjukkan bahwa era disruptif membawa dampak bagi kemajuan informasi dan teknologi yang berpengaruh terhadap moral siswa sehingga guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan ke arah yang lebih baik kepada siswanya. Kesimpulannya yaitu bahwa guru PKn mempunyai peran penting dalam membentuk moral siswa.

Kata kunci: Peran guru PKn, Pendidikan Moral, Era disruptif

ABSTRACT

The civic's teachers have functions to brought the students became an educated participants into a man who has an impression of conduct in carrying out duties and responsibilities as good citizens. Therefore a teacher must be able to use his function as a moral guide, attitude, and knowledge to his students. In this disruptive era in which increasingly advanced technologies were making it easier for students to access a wide and easy array of information. But developing this technology sometimes makes students less wise about sorting through information and sometimes students easily access negative content and replicate negative behaviors that ultimately make the students' morals degenerate. Writing this article using a bibliography method. The purpose of writing this article is to describe civic teacher's role In forming a moral of junior high school's students in the disruptive era. This article has shown that the disruptive era brought an impact on influential information and technology advances on students' morals so civic's teachers must be able to use their function as a moral guide, to act and encourage their students in a better way. The conclusion is that teachers do not play an important role in shaping the students' morals.

Keyword: civic teacher's role, moral education, disruptive era

PENDAHULUAN

Berkembangnya isu-isu moral di era disruptif di kalangan remaja seperti tindakan melawan orang tua, melanggar peraturan atau kebijakan sekolah, tawuran pelajar, penggunaan narkoba, pornografi,

kekerasan dan lai-lain sudah menjadi masalah sosial yang serius di kalangan pelajar yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

[1] Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (2017:2) disrupti merupakan perubahan yang sangat mendasar sebagaimana telah terjadi di berbagai industri, seperti musik, surat-menyurat, media cetak, dan transportasi publik, seperti taksi. [2] Sedangkan Era disrupti yaitu era di mana komunikasi dan teknologi semakin maju, informasi tidak lagi dibendung, sumber informasi tidak hanya diperoleh dari satu atau dua media saja, melainkan ada puluhan, ratusan bahkan ribuan, dan itu dapat menjadi pembawa informasi dan pengetahuan baru bagi peserta didik.

Pada hakikatnya perilaku bermoral berkaitan dengan harkat martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk mulia di muka bumi ini. Harkat dan martabat yang ditunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah dalam pembentukan hubungan yang harmonis antar sesama dan pembangun tatanan masyarakat yang tertib dan beradab. Kondisi tersebut pada hakikatnya akan berdampak terhadap kebahagiaan individu serta kesejahteraan masyarakat luas.

[3] Dalam kehidupan bermasyarakat, aspek atau nilai-nilai moral sangat dibutuhkan untuk digunakan sebagai panduan dalam perumusan aturan-aturan yang mengatur kehidupan. Pengabaian nilai moral yang menyebabkan perilaku yang tidak bermoral, lambat laun akan membentuk budaya dan peradaban yang menunjukkan penurunan harkat dan martabat manusia. Menyadari penting dan mendesaknya pendidikan moral maka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai peran yang mendasar bagi terbentuknya manusia Indonesia yang bermoral.

Di Indonesia, terdapat beberapa fakta yang dapat mencerminkan rendahnya tindakan moral remaja. Dikutip dari [4] laman inews.id disebutkan bahwa dalam laporannya, Retno Listyarti selaku

komisioner KPAI bidang pendidikan mengungkapkan bahwa lembaganya mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak di bidang pendidikan per 30 Mei 2018 sebanyak 161 kasus. Perinciannya, kasus anak korban tawuran sebanyak 23 kasus (14,3 persen), kasus anak pelaku tawuran sebanyak 31 kasus (19,3 persen), dan kasus anak korban kekerasan dan *bullying* sebanyak 36 kasus (22,4 persen). Dikutip dari laman KPAI juga disebutkan bahwa 202 anak tawuran dalam dua tahun.

Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari pendidikan di Indonesia yaitu untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang mempunyai kepribadian, beretika, bermoral dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya seperti yang diuraikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab II pasal 3 yakni: Manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu perlu ditanamkan sikap jujur, saling menghargai, bertoleransi dalam diri setiap siswa, karena sikap ini mempunyai dampak luas bagi di kehidupan orang lain dalam masyarakat dan negara.

[5] Untuk menanamkan nilai-nilai moral tersebut proses pendidikan di sekolah hendaknya diarahkan pada pembentukan nilai moral yang baik bagi siswa. Pendidikan nilai/moral tersebut dapat diberikan melalui adanya Pendidikan Agama, atau bisa juga melalui Pendidikan Kewarganegaraan baik mulai dari sekolah dasar maupun sekolah menengah dan hingga perguruan tinggi, mengingat bahwa salah satu kajian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yakni mengenai moral.

Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas saja, melainkan juga bertanggung jawab dalam pembinaan dan pembentukan karakter dan moral siswa agar sesuai dengan nilai, etika, moral, norma, yang berlaku di masyarakat sehingga akan terbentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dan mempunyai karakter budaya Indonesia. Selain itu seorang guru dapat bekerja sama dengan wali kelas untuk menghargai bagaimana dan di mana nilai-nilai moral diterapkan di ruang kelas dan sekolah.

Di dalam implementasinya, guru PPKn memegang peranan penting dalam pembentukan warga negara Indonesia yang baik (*to be a good citizenship*). Menurut pendapat Nu'man Soemantri (1976:35) "Guru PKn harus banyak berusaha agar siswa-siswanya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta keterampilan yang bermanfaat. oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik". Rumusan masalah dalam penulisan artikel ini yaitu bagaimana peran guru PKn dalam membina moral siswa SMP di era disruptif? Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran guru PKn dalam membina moral siswa SMP di era disruptif.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Menurut [6] Ritzer (2012: 181) Pendidikan didefinisikan bagi Durkheim sebagai proses yang ditempuh individu untuk memperoleh alat-alat fisik, intelektual, dan paling utama adalah alat-alat moral, yang dibutuhkan agar dapat berfungsi di dalam masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk membantu anak-anak mengembangkan suatu sikap moral terhadap masyarakat. Hal tersebut memungkinkan pendidikan untuk menghadirkan dan

memproduksi kembali ketiga elemen moralitas sekaligus.

Pertama, pendidikan akan memberi para individu disiplin yang mereka butuh kan untuk mengendalikan nafsu-nafsu yang mengancam mereka. Kedua, pendidikan dapat mengembangkan rasa kesetiaan siswa terhadap masyarakat dan terhadap sistem moralnya. Ketiga, peran pendidikan di dalam pengembangan otonomi, yang memuat disiplin "yang diinginkan secara bebas" dan kelekatan terhadap masyarakat berdasarkan "persetujuan yang tercerahkan". Jadi pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam membentuk moral siswa, khususnya melalui pemberian pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena di dalam salah satu kajian PKn yaitu mengenai moral.

Di era disruptif ini perlu ditanamkan pendidikan moral kepada peserta didik agar peserta didik tidak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Sesuai dengan pendapat [7] Lawrence Kohlberg dalam Asri Budiningsih (2008: 25), seorang pakar pendidikan moral pernah mengatakan bahwa perkembangan moral seorang anak erat hubungannya dengan cara berpikir seorang anak. Anak memiliki kemampuan untuk melihat, mengamati, memperkirakan, berpikir, menduga, mempertimbangkan, dan menilai, akan mempengaruhi perkembangan moral dalam diri anak. Semakin baik kemampuan berpikir anak, maka semakin besar kemungkinan anak memiliki perkembangan moral yang baik. Anak dengan perkembangan moral yang baik diharapkan mampu memahami konsep moral yang baik dan kemudian berperilaku sesuai standar tersebut dengan konsisten.

Di dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Jadi guru bukan hanya bertugas untuk mentransfer ilmu ke siswa melainkan juga bertanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan peserta siswa agar mempunyai moral yang baik.

Selain itu, menurut [8] Suyatno, Jumintono, Pambudi, D. I., Mardati, A., & Wantini (2019) menyatakan bahwa teladan nilai-nilai yang berasal dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan personel pendidikan adalah faktor-faktor penting dalam pembentukan nilai-nilai siswa. Ketidakcocokan baik kata-kata maupun tindakan dari para guru akan menyulitkan para siswa untuk menerima nasihat dan pelajaran mengenai nilai-nilai di sekolah.

Kemudian menurut pendapat. [9] Nu'man Soemantri (1976:35) menyatakan bahwa "Guru Pkn harus banyak berusaha agar siswa-siswanya mempunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru PKn harus dapat memanfaatkan fungsi sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik".

[10] Guru adalah orang yang paling sering bertemu dengan siswa selain orang tua mereka. Jadi, para guru memiliki tanggung jawab untuk memelihara nilai-nilai moral kepada siswa mereka. Sebagai guru, diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka berdasarkan pada filsafat pendidikan nasional. Filosofi pendidikan nasional ini menyediakan bimbingan dalam membangun sumber daya manusia dengan berbagai nilai yang baik dan salah satunya adalah rasa bertanggung jawab tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat, agama dan negara (Hamidah Yusof, Mohd Asri Mohd Noor: 2018).

[11] Mengenai pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dapat dilakukan dengan memasukkan atau menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap materi pembelajaran, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan di lingkungan sekolah (Sayektinginingsih, Bambang Sumardjoko, dan Achmad Muhibin: 2017).

[12] Menurut pendapat Marzuki dan Yoga Ardian Feriand (2016) guru Pkn memiliki pengaruh yang penting terhadap tindakan moral siswa. Jika peran guru PKn baaik, tindakan moral siswa juga akan semakin baik. Beberapa peran yang dapat dilakukan guru PPKn untuk dapat mempengaruhi tindakan moral siswa yakni seperti, memotivasi, mengarahkan, menjadi inisiator, menjadi informator, menjadi evaluator, dan menjadi fasilitator yang baik bagi siswa.

HASIL

Era disrupsi membawa dampak perubahan dalam hal komunikasi dan teknologi, di mana informasi tidak lagi dibendung, sumber informasi tidak hanya diperoleh dari satu atau dua media saja, melainkan ada puluhan, ratusan bahkan ribuan dan hal tersebut dapat menjadi pembawa informasi dan pengetahuan baru bagi siswa. Namun apabila kemajuan teknologi tersebut tidak dibarengi dengan penanaman moral kepada siswa akan dapat berdampak buruk bagi perilaku atau moral siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Di sinilah peran penting pendidikan dalam membentuk moral siswa. Melalui pendidikan di sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah siswa mendapatkan pelajaran pendidikan agama atau pun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang mana keduanya sangat erat kaitannya dalam membentuk

moral siswa. Karena di dalam mata pelajaran tersebut siswa mendapatkan berbagai macam pengetahuan mengenai mana perilaku yang baik dan buruk, mana perilaku yang seharusnya ditiru atau ditinggalkan. Dengan mempunyai pengetahuan yang baik diharapkan siswa juga mampu menerapkan pengetahuan yang di dapat tersebut agar dapat berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itulah diperlukan peran guru PKn yang mana guru PKn bertanggung jawab untuk membangun atau membina moral siswa. Tidak hanya melalui pemberian materi atau pengetahuan melalui pembelajaran di kelas saja (transfer ilmu) , tetapi guru PKn juga harus mempunyai moral yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi siswanya dalam bersikap dan berperilaku agar siswa dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga dengan demikian maka siswa nantinya akan terbentuk sebagai good citizen yang mana sesuai dengan tujuan dari adanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu sendiri.

KESIMPULAN

Era disruptif memberikan dampak positif bagi siswa dalam hal mengakses informasi namun di sisi lain kemajuan informasi dan teknologi dapat juga berdampak negatif pada moral siswa apabila tidak digunakan secara benar (disalahgunakan) oleh siswa. Dalam hal ini guru mempunyai peran penting dalam membina siswa agar tidak salah dalam memanfaatkan teknologi, khususnya guru PKn yang mana berperan sebagai pengembang moral siswa.

Guru PKn tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu atau memberi pengetahuan ke siswa tetapi juga

bertanggung jawab dalam pembentukan moral siswa. Untuk itulah seorang guru PKn harus mampu memaksimalkan tugasnya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik kepada siswa. Tidak hanya melalui pemberian pengetahuan tetapi guru PKn juga dapat memberikan contoh keteladanan perilaku moral yang baik kepada siswa. Semakin baik peran guru PKn dalam menanamkan pendidikan moral ke siswa maka moral siswa juga akan semakin baik.

Sedangkan peran yang dapat dilakukan guru PPKn untuk dapat mempengaruhi tindakan moral siswa yakni dengan cara memotivasi, mengarahkan, menjadi inisiatör, menjadi informator, menjadi evaluator, dan menjadi fasilitator yang baik bagi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. Era Disrupsi Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. diakses pada https://www.google.com/urlEra_Disrupsi_E_book_6_2017-1.pdf
- [2] Rineka Cipta. Prima Melati. 2016. Peranan Guru PKn Dalam Membina Etika Siswa Di Sekolah. Volume III Nomor 2, ISSN 2460-1802.
- [3] Yanty Rosdiana Barutu. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017. e-ISSN: 2549-5976, p-ISSN:2549-435X.
<http://semnasfis.unimed.ac.id>.
- [4]
<https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/news/amp/kpai-catat-161-kasus-kekerasan-anak-di-bidang-pendidikan-selama-2018/189701>.
- [5] McRobert Lewis and Veronica Ponzio. 2016. Character Education As The Primary Purpose Of Schooling For The Future. JIP- International Multidisciplinary Journal. p-ISSN: 2338-8617 e-ISSN: 2443-2067.
- [6] Ritzer, George. Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. 2012. Bantul: Kreasi Wacana.
- [7] Budiningsih, Asri. 2008. Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budaya. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- [8] Suyatno, Jumintono, Tambudi, D. I., Mardati, A., & Wantini. 2019. Strategy of Values Education in the Indonesian Education System. International Journal of Instruction. Vol.12, No.1. p-ISSN: 1694-609Xpp. 607-624. e-ISSN: 1308-1470.
- [9] Soemantri M. N. (1976). Metode Mengajar Civics. Jakarta: Erlangga.
- [10] Hamidah Yusof, Mohd Asri Mohd Noor, Norasibah Abdul Jalil, Mahaliza Mansor, Marinah Awang. 2018. Nurturing Moral Values in Primary School. International Journal Of Academic Research In Business And Social Science. Vol. 8, No. 7. E-ISSN: 2222-6990.
- [11] Sayektinginsih, Bambang Sumardjoko, dan Achmad Muhibin. 2017. Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Madrasah Aliyah Klaten. Jurnal Managemen Pendidikan - Vol. 12, No. 2. ISSN: 1907-4034.
- [12] Marzuki dan Yoga Ardian Feriandi. 2016. Pengaruh Peran Guru PPKn Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tindakan Moral Siswa. Jurnal Kependidikan. Volume 46, Nomor 2, Halaman 193-206.
- [13] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [14] Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [15] <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-202-anak-tawuran-dalam-dua-tahun>.

